



**BERHENTI
MENGAYOMI
KORUPSI**

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TREN PENINDAKAN KORUPSI SEMESTER I TAHUN 2022

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

November 2022

www.antikorupsi.org

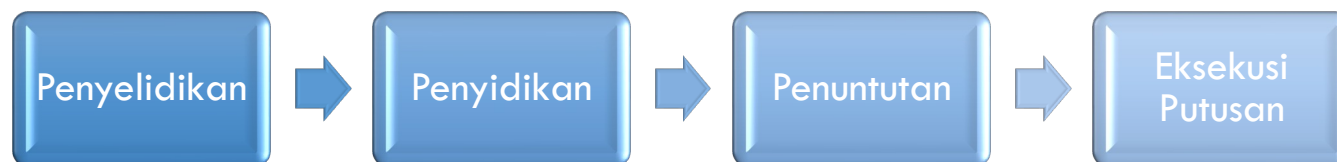
Latar Belakang

- Jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun seringkali meningkat → Korupsi seperti penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan
- Kerja penindakan mengambil peran sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi
- Meski telah dilabeli sebagai *extra-ordinary crime*, tak lantas membuat pemerintah menangani korupsi secara lebih serius →



Latar Belakang

- Demi menjaga *check and balances*, peran serta masyarakat menjadi penting



- Peran serta masyarakat sendiri telah diatur melalui sejumlah regulasi., di antaranya Pasal 13 angka 1 United Nation Convention Against Corruption dan Pasal 41 UU Tipikor. Serta, peraturan pelaksanaannya di PP 43/2018
- Regulasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada APH mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi



*Sumber: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK

Total anggaran yang dialokasikan untuk penindakan kasus korupsi (penyelidikan/penyidikan) seluruh APH

Rp 449 Miliar

1.387 Kasus

Target penindakan APH pada tahun 2022 (semester I)



Tujuan Pemantauan

- Memberikan gambaran mengenai penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK sepanjang semester I tahun 2022.
- Mendorong transparansi data penindakan kasus korupsi di tiap instansi penegak hukum tersebut.



Metode

- Tabulasi data;
 - Data informasi berasal dari media dan/atau situs resmi penegak hukum;
 - Periode pemantauan: 1 Januari – 30 Juni 2022;
- Olah data;
- Penilaian Kinerja APH didasarkan pada DIPA TA 2022
- Data komparasi;
- Analisis deskriptif.



Keterbatasan Pemantauan

1. Sumber data yang diperoleh ICW, sebagian besar berasal dari sumber sekunder
2. Perbedaan terminologi terkait tipikor yang ditangani APH, ICW menggunakan istilah “kasus” sedangkan APH menggunakan istilah “perkara”



Temuan Umum

Kasus



252 Kasus

Tersangka



612 Orang

Potensi Kerugian
Negara



Rp33,665 Triliun

Potensi Suap



Rp149 Miliar

Potensi
Pungutan Liar



Rp8,8 Miliar

Potensi
Pencucian Uang



Rp931 Miliar



Penilaian Kinerja Penindakan Kasus Korupsi

$$\frac{\text{Penindakan kasus yang terpantau}}{\text{Target penindakan kasus}} \times 100\% = \% \text{ kasus yang ditangani}$$

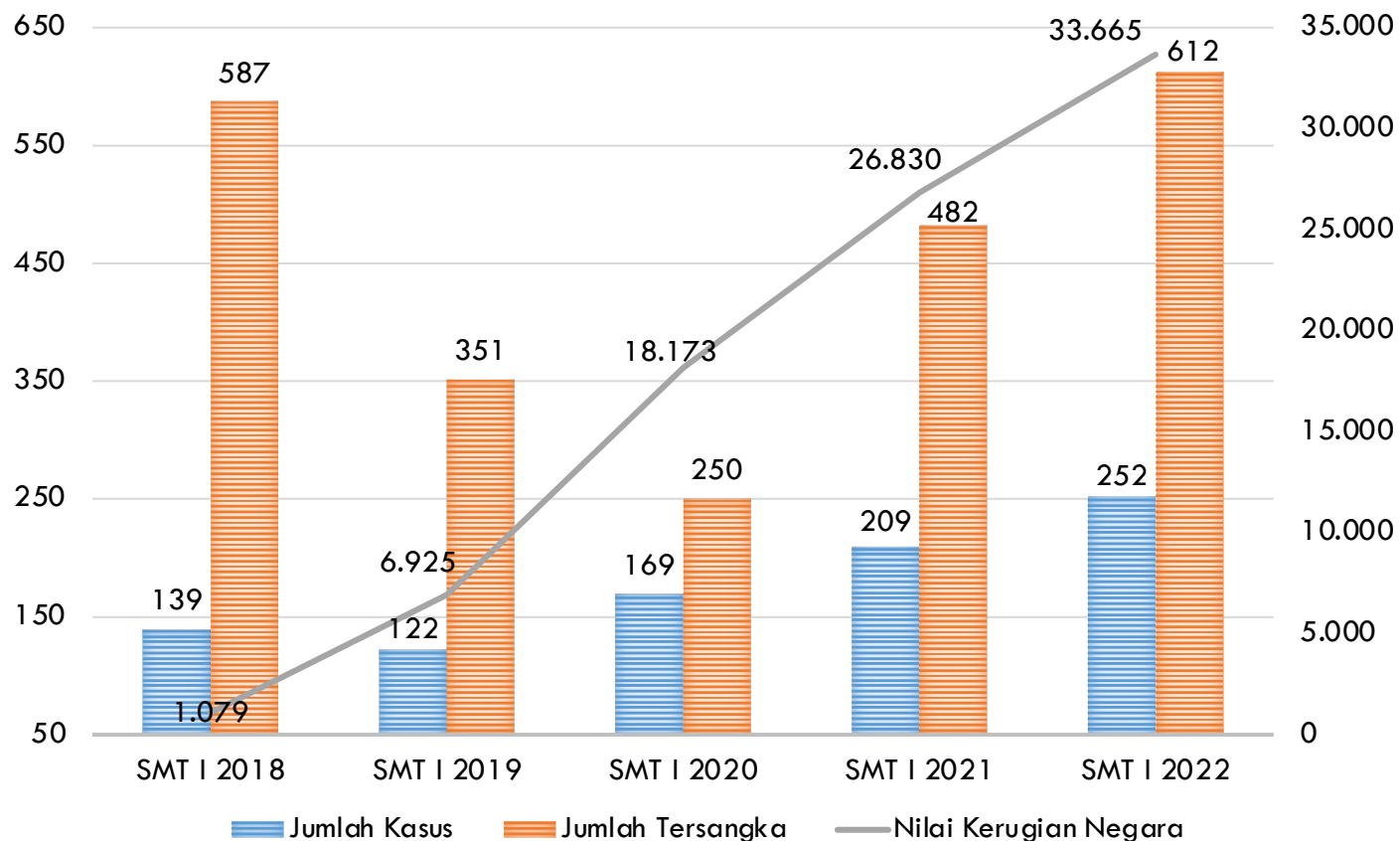
No	% Kasus yang ditangani	Peringkat	Keterangan
1	81-100	A	Sangat baik
2	61-80	B	Baik
3	41-80	C	Cukup
4	21-40	D	Buruk
5	0-20	E	Sangat buruk



Dari target sebanyak 1.387 kasus korupsi pada Semester I Tahun 2022, keseluruhan Aparat Penegak Hukum terpantau hanya mampu merealisasikan sebanyak 252 kasus korupsi atau sekitar 18 persen. Sehingga kinerja penindakan kasus korupsi hanya mendapatkan nilai:

E

Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018-2022



- Penindakan kasus korupsi oleh APH mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah kasus maupun tersangka, meski tidak signifikan
- Potensi nilai kerugian secara konsisten terus meningkat setiap tahun
- Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan.



Tiga Kasus Penyumbang Kerugian Negara Terbesar Selama Semester I Tahun 2022

Begini Cara Kejagung Hitung Kerugian Negara Rp 18 T dalam Kasus Ekspor CPO

kumparanNEWS

31 Agustus 2022 18:03 · waktu baca 5 menit



Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Foto: Kejaksaan Agung RI

Korupsi Garuda untuk Pengadaan Bombardier dan ATR Rugikan Negara Rp 8,8 Triliun

Reporter

Muhammad Hendartyo

Editor

Francisca Christy Rosana

Senin, 27 Juni 2022 14:17 WIB



Home > Nasional > Hukum Kriminal

Kronologi Korupsi Ekspor Rugikan Negara Rp2,6 T yang Dikuak Kejagung

CNN Indonesia

Jumat, 07 Jan 2022 10:11 WIB

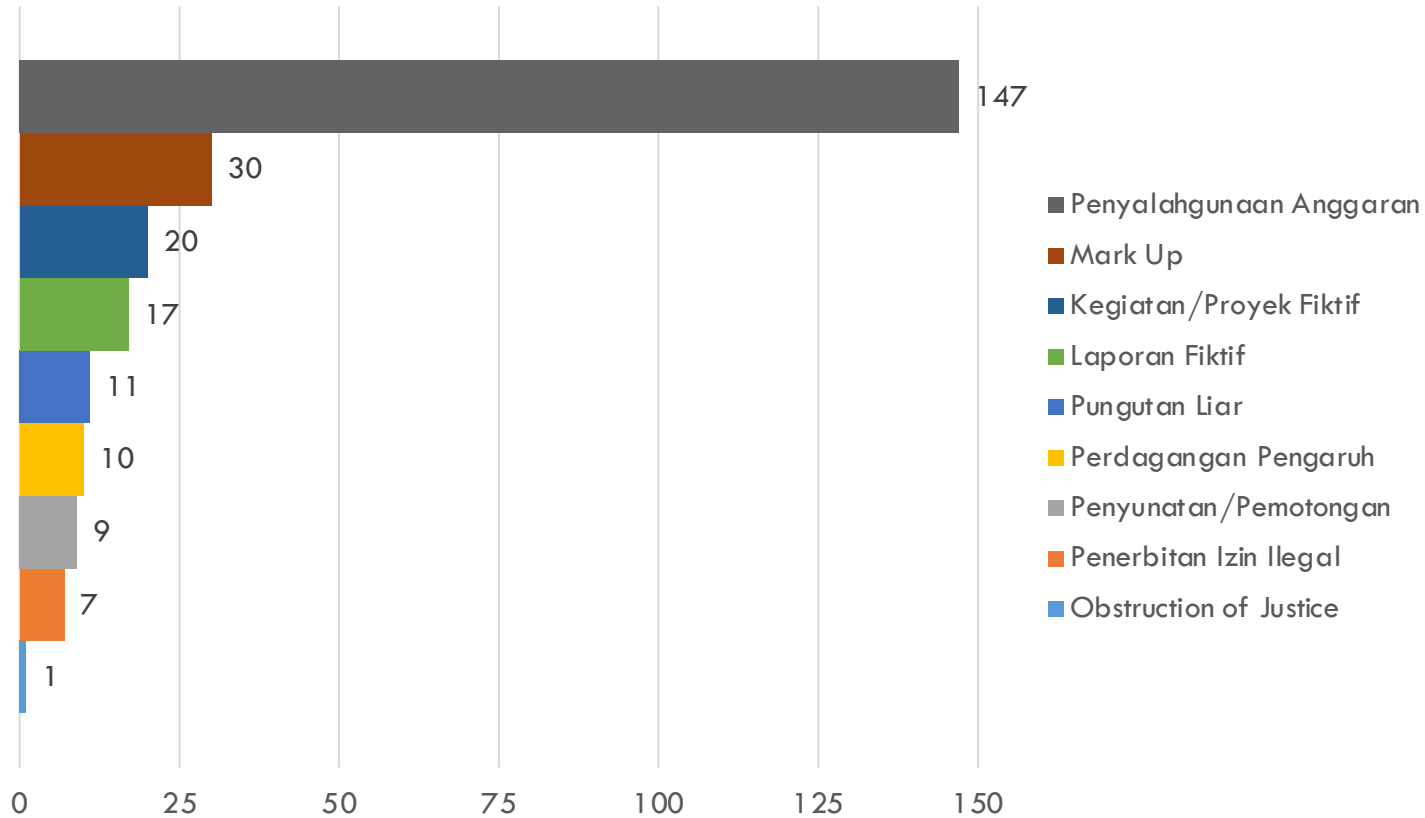
Bagikan :



Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di pelabuhan Indonesia. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

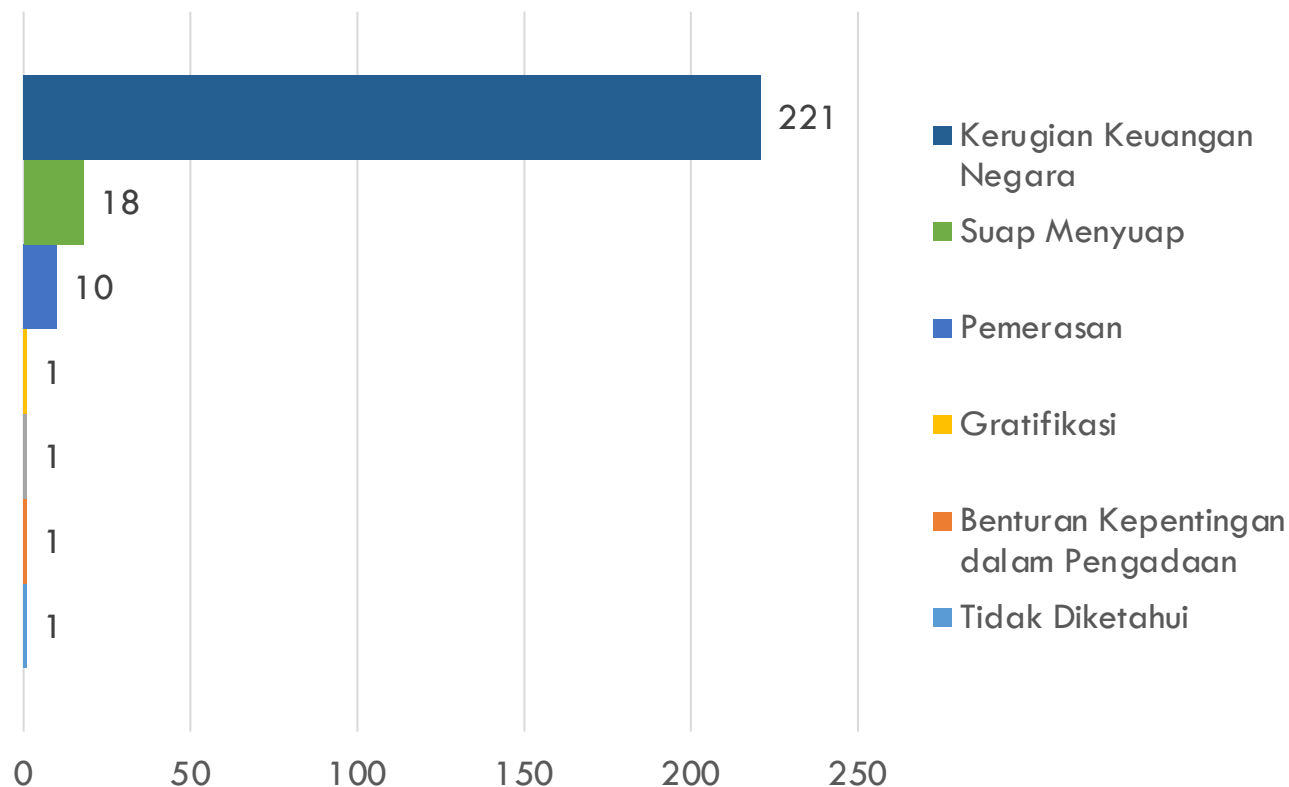


Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Semester I Tahun 2022



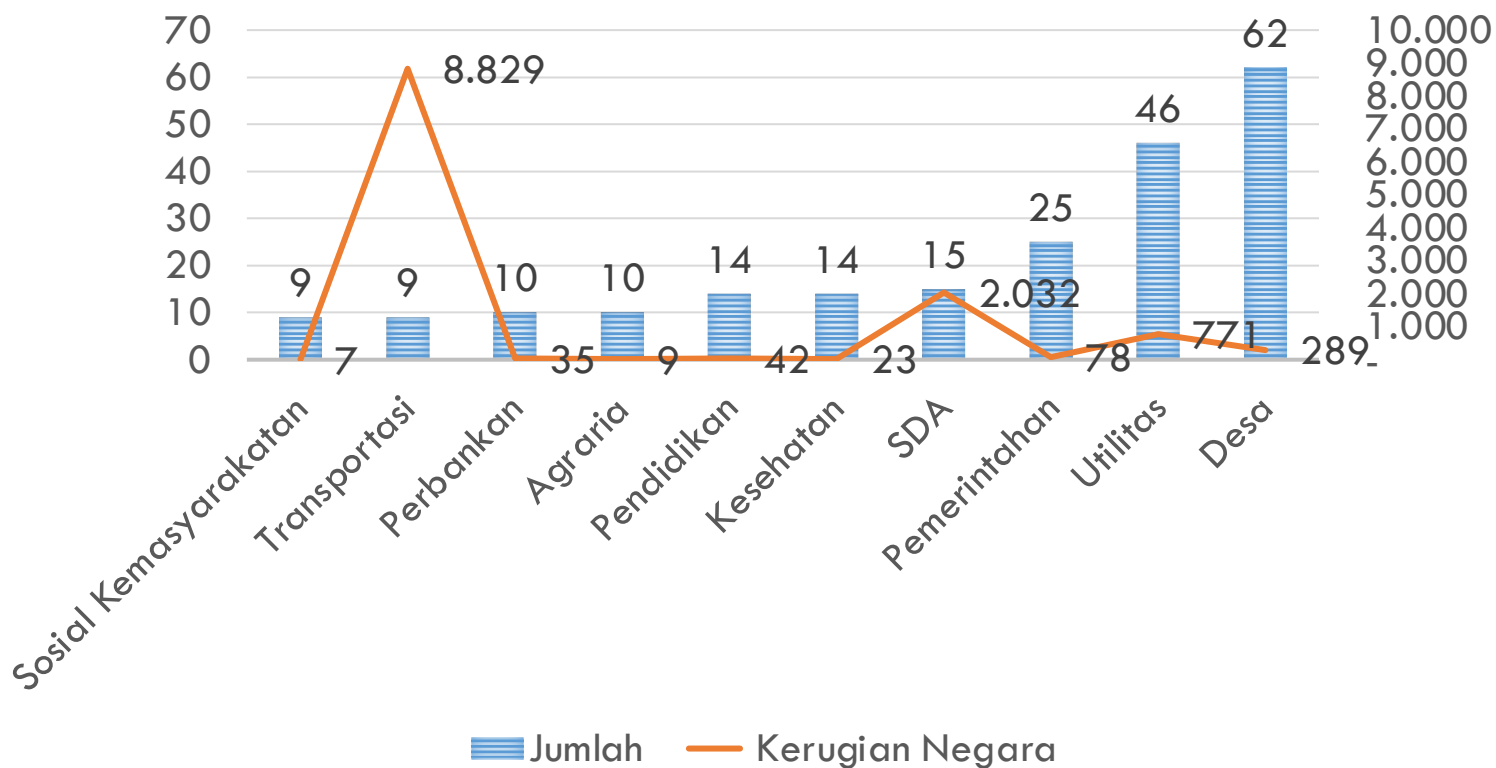
- Penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling dominan digunakan oleh pelaku kasus korupsi;
- Modus lainnya yang sering digunakan adalah *mark up* dan kegiatan/proyek fiktif
- Ketiga modus tersebut seringkali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah
- Dari 252 kasus yang berhasil diungkap, 134 kasus atau 53% diantaranya berdimensi PBJ

Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Pada Semester I Tahun 2022



- Tercatat sepanjang semester I tahun 2022, APH paling banyak mengusut korupsi dengan jenis Kerugian Negara (Pasal 2/3 UU Tipikor)
- Dari 252 kasus, APH tercatat hanya enam kasus yang turut dikenakan pasal pencucian uang, yakni kasus:
 1. Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi Liquefied Natural Gas (LNG) dan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih (Kejaksaan);
 2. Pendudukan lahan perkebunan, Sumatera Selatan (Kepolisian);
 3. Kasus korupsi wali kota, Kota Bekasi (KPK);
 4. Kasus korupsi Bupati Banjar Negara (KPK)
 5. Pengadaan Lahan untuk Rumah Susun di Cengkareng (Kepolsian)
 6. Kasus Korupsi Impor Baja (Kejaksaan)

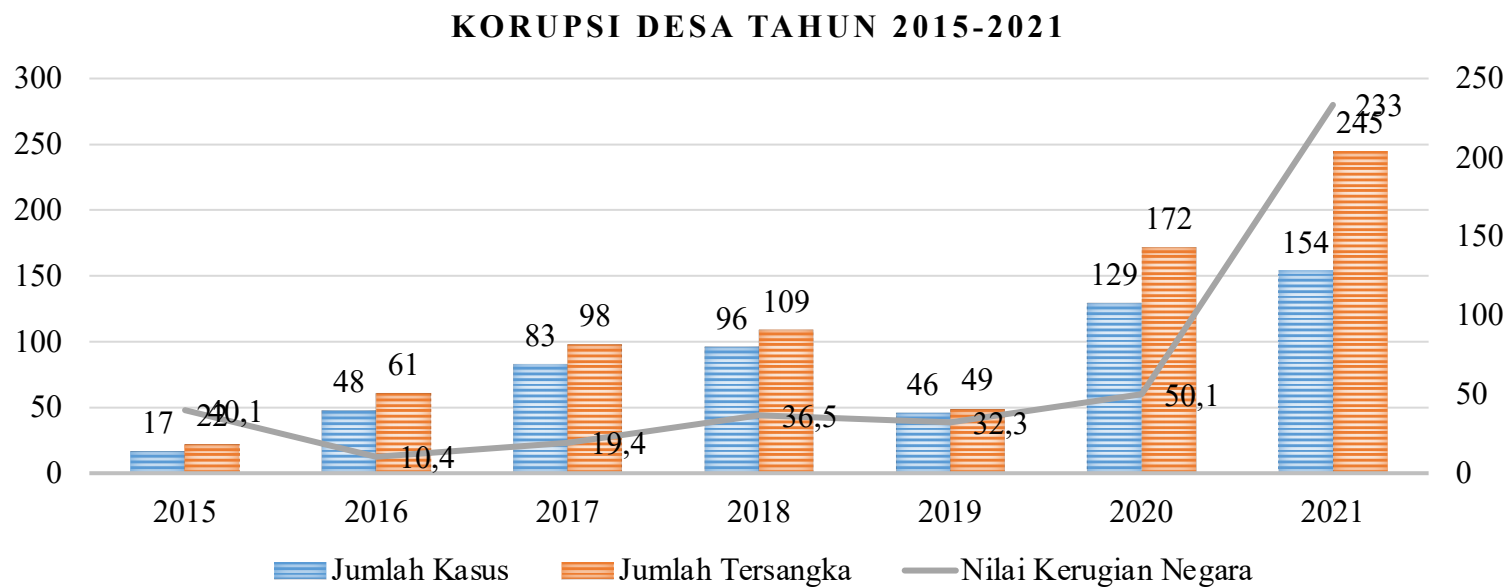
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Semester I Tahun 2022



- Aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor desa, disusul utilitas, dan Pemerintahan;
- Sementara nilai kerugian negara yang paling besar ada pada sektor transportasi.

Korupsi Desa

- Sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa



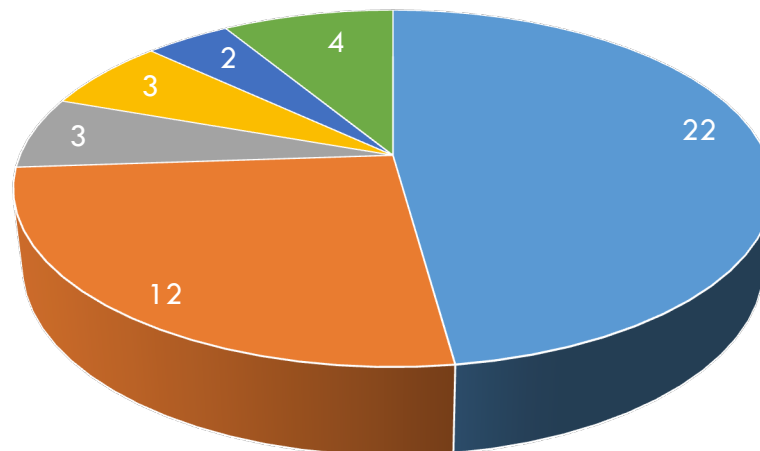


Korupsi Desa

- Tidak seluruhnya berkaitan dengan dana desa: secara rinci, 85% berkaitan dengan dana desa, sementara 15% berkaitan dengan penerimaan desa
- Pemerintah, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perlu mengambil langkah konkrit untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih strategis
- Upaya Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sektor dana desa melalui Stranas PK sendiri juga patut dipertanyakan
- Selain itu, peran Satgas Dana Desa yang dibentuk tahun 2018 tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan untuk memitigasi terjadi tindak pidana korupsi

Sektor Utilitas

- Sektor ini berkaitan dengan kelengkapan penunjang untuk pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, seperti infrastruktur transportasi, jaringan air minum, perumahan, dst



■ Kebersihan dan Tata Kota ■ Infrastruktur Transportasi ■ Perumahan
■ Penerangan Jalan ■ Jaringan Listrik ■ Jaringan Air Minum

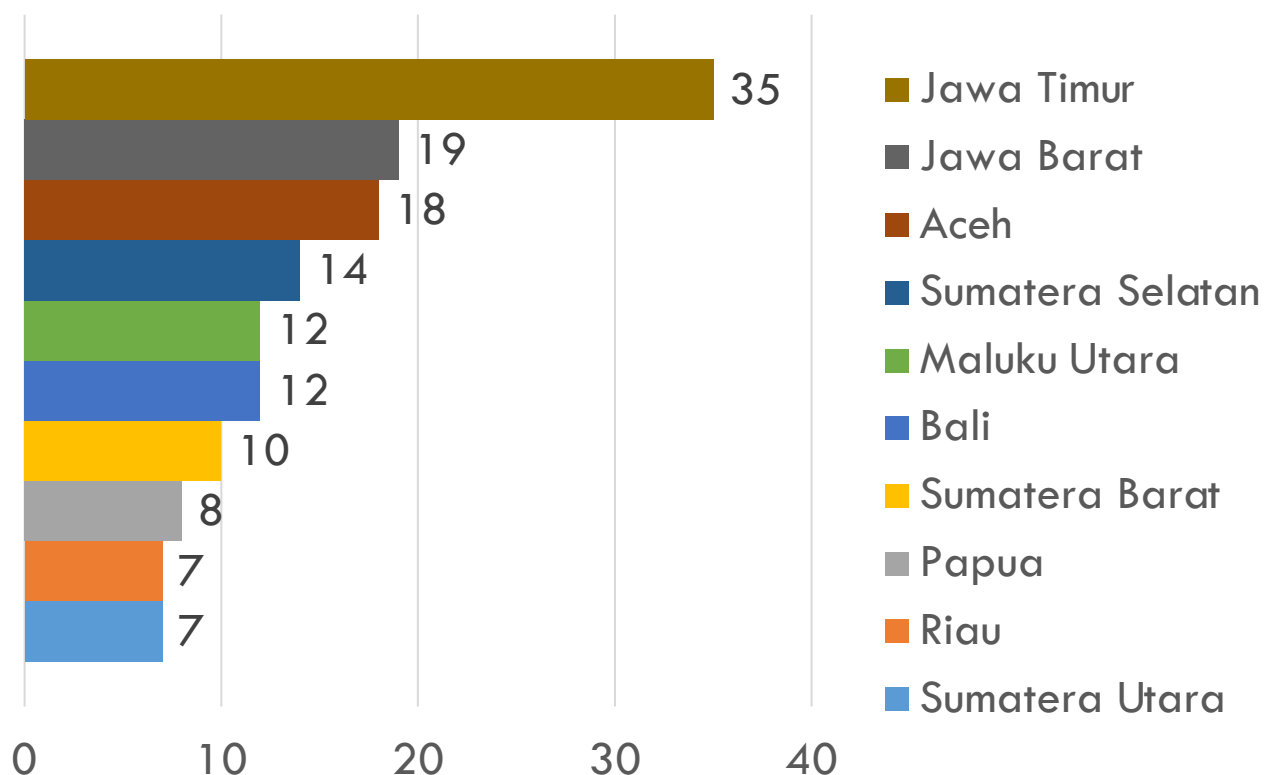
Sektor Pemerintahan



25 kasus korupsi dengan potensi nilai kerugian negara sebesar Rp 78 Miliar

- Ketidaktepatan dalam pengelolaan negara baik di level pusat maupun daerah akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional
- Optimalisasi peran APIP untuk mencegah potensi terjadinya mismanajemen sektor pemerintah yang berujung korupsi

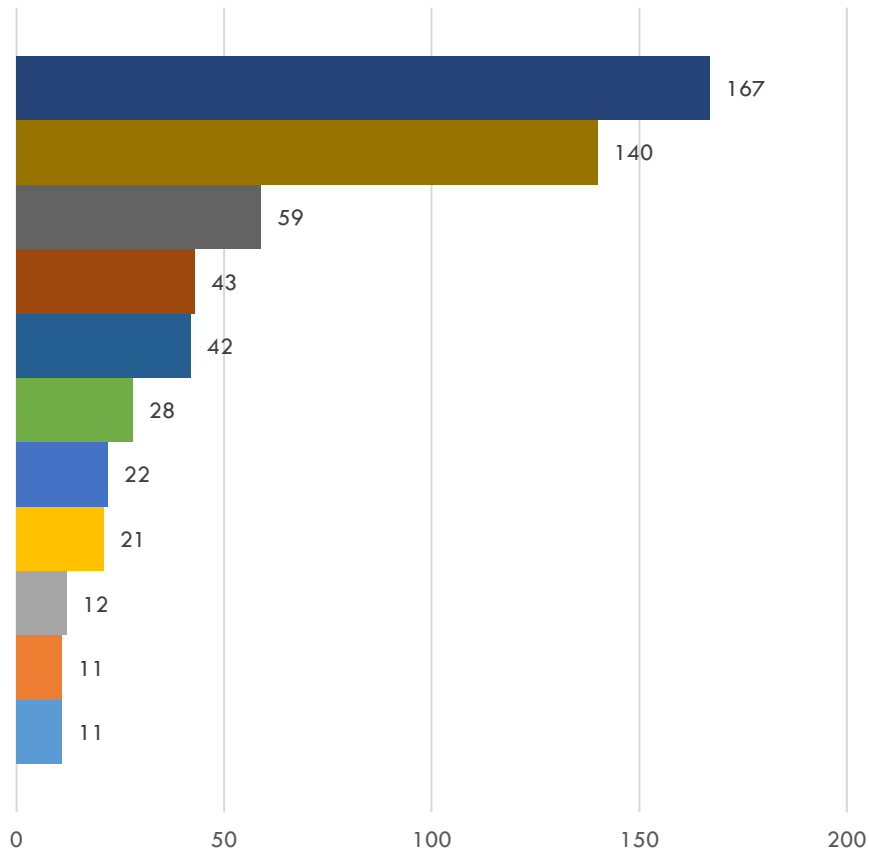
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Semester I Tahun 2022



- Pemetaan terhadap wilayah ini TIDAK serta menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah wilayah paling korup;
- Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak ditangani oleh APH;
- Selain itu, tidak ditemukan informasi mengenai adanya penanganan perkara di Kalimantan Utara



Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Semester I Tahun 2022 (Top 10)



- Aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah Pegawai Pemerintahan Daerah, Swasta, dan Kepala Desa
- Selama tahun semester I tahun 2022, tercatat Kepala Daerah yang ditangani oleh APH sebanyak 12 orang, 10 diantaranya diusut oleh KPK
- Jika dilihat lebih rinci, dari 612 tersangka, 38% diantaranya berstatus sebagai ASN
- Jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah sebanyak 6 korporasi (dalam satu kasus) ditangani oleh Kejaksaan Agung.
- Tidak ditemukan informasi mengenai penanganan kasus korupsi korporasi yang dilakukan oleh KPK dan Kepolisian



Target Kerja dan Anggaran Semester I Tahun 2022



Kasus



Rp juta/kasus



Kasus



Rp juta/kasus



Kasus



Rp juta/kasus

Nasional

25

217,8

40

155,1

120

138,3

Provinsi

2-47

116-1.388

2

129,8

Kab/Kota

1-75

4,1-640

2

129,8

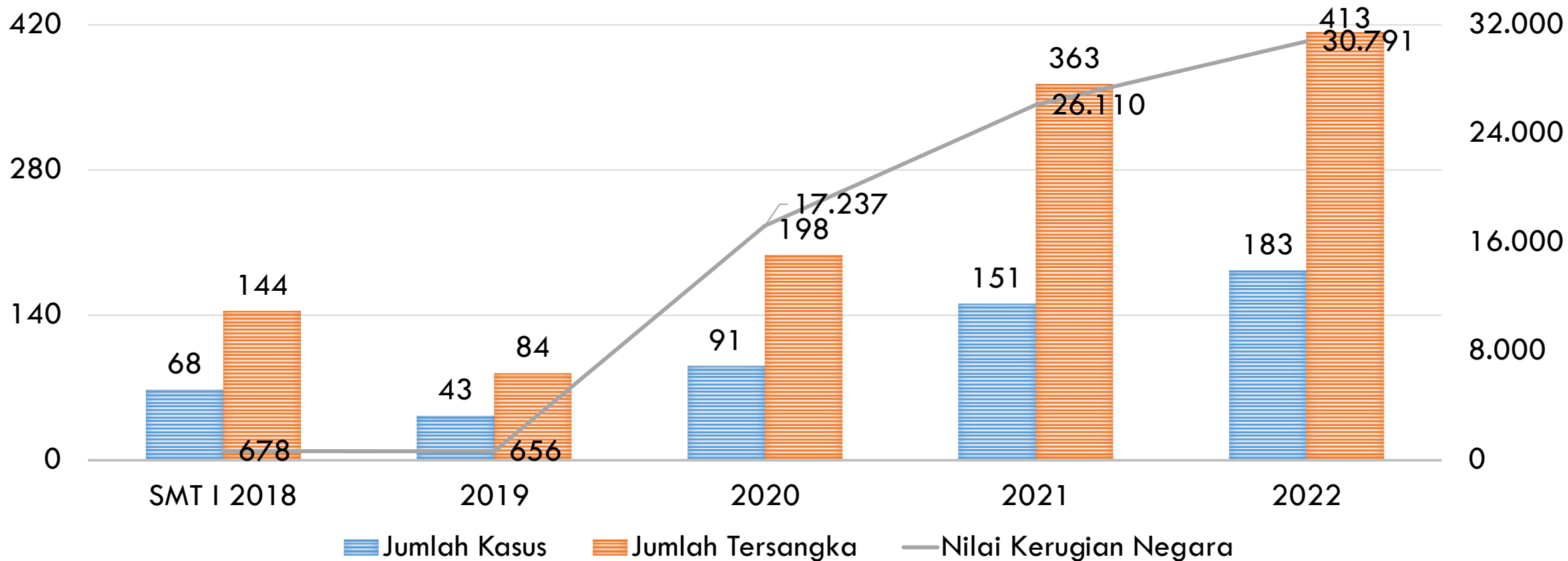
N/A

Kinerja Penegak Hukum Semester I Tahun 2022

			
	183 kasus	54 kasus	15 kasus
	413 tersangka	141 tersangka	58 tersangka
	Rp30.791 triliun	Rp853 miliar	Rp2.021 triliun



Kejaksaan





Kuantitas Penanganan Kasus

- Kejaksaan memiliki kantor sebanyak 536 kantor di seluruh Indonesia dengan target penanganan kasus selama semester I 2022 sebanyak 514 kasus. Anggaran yang dikelola sebesar Rp138,9 miliar;
- Kejaksaan sepanjang semester I tahun 2022 tercatat hanya menangani sebanyak 183 kasus dengan 413 orang ditetapkan sebagai tersangka ;
- Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan sekitar 36 persen atau masuk dalam kategori **C atau Cukup**
- Hanya terdapat 26 Satuan Kejaksaan yang telah menangani sebanyak 2 kasus atau lebih

Kualitas Penanganan Kasus

- Aktor yang diusut: Pegawai Pemerintahan Daerah sebanyak 166 orang, Swasta sebanyak 140 orang, Kepala Desa sebanyak 59 orang, Perangkat Desa sebanyak 43 orang, dan pegawai BUMD sebanyak 21 orang.
- Dari 183 kasus yang diusut, 169 atau 92% mengenakan pasal 2 dan/atau pasal 3 UU Tipikor. Sementara hanya ada 2 kasus yang dikenakan pasal pencucian uang
- Nilai kerugian negara dari kasus yang ditangani oleh Kejaksaan menjadi yang terbesar selama semester I tahun 2022 ketimbang instansi lainnya, yakni Rp 30.791 triliun.
- Namun hal ini tidak dapat serta merta menjadi suatu pencapaian karena Kejaksaan harus memastikan bahwa nilai kerugian sebesar itu harus kembali kepada kas negara.

Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi

- Aktor yang diusut oleh Kejaksaan tersebut di atas, korps Adhyaksa terpantau belum melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan kategori high profile
- Perlu ada peningkatan kinerja dengan menandakan adanya koordinasi dan supervisi dari Jampidsus, Kejaksaan Agung



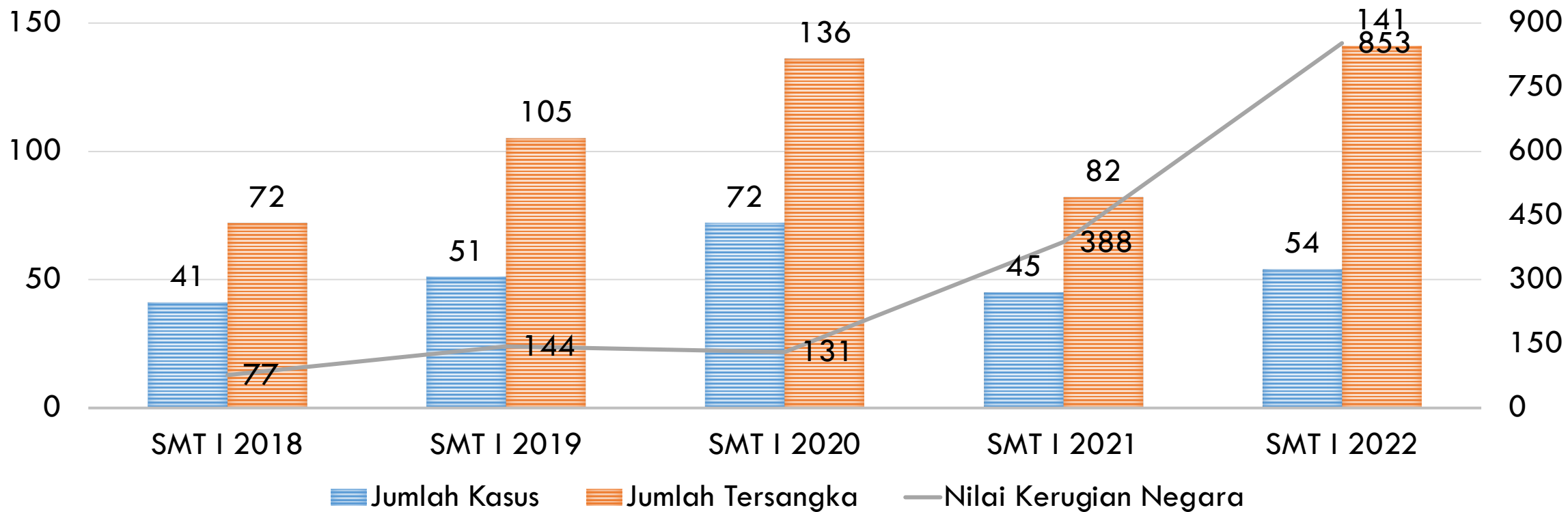


Wacana Restorative Justice Kejaksaan Agung

- Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa korupsi di bawah Rp50 juta cukup mengembalikan kerugian negara dan dilakukan pembinaan;
- Penting diketahui bahwa berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak lantas menghentikan perkara.
- Sikap Kejaksaan Agung tersebut bertolak belakang dengan Kepolisian yang tidak memasukkan tindak pidana korupsi sebagai persyaratan materil untuk tindak pidana yang ditangani berdasarkan keadilan restoratif (Perkapolri 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif)



Kepolisian





Kuantitas Penanganan Kasus

- Penanganan kasus korupsi di Kepolisian semakin menurun dibandingkan dengan tahun –tahun sebelumnya
- Kepolisian memiliki 511 kantor. Target penanganan kasus korupsi selama semester I 2022 sebanyak 813 kasus dengan anggaran sebesar Rp291,7 miliar.
- Kepolisian selama semester I tahun 2022 tercatat hanya dapat menangani 54 kasus. Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sekitar 7 persen atau masuk dalam kategori **E atau Sangat Buruk**

Kualitas Penanganan Kasus

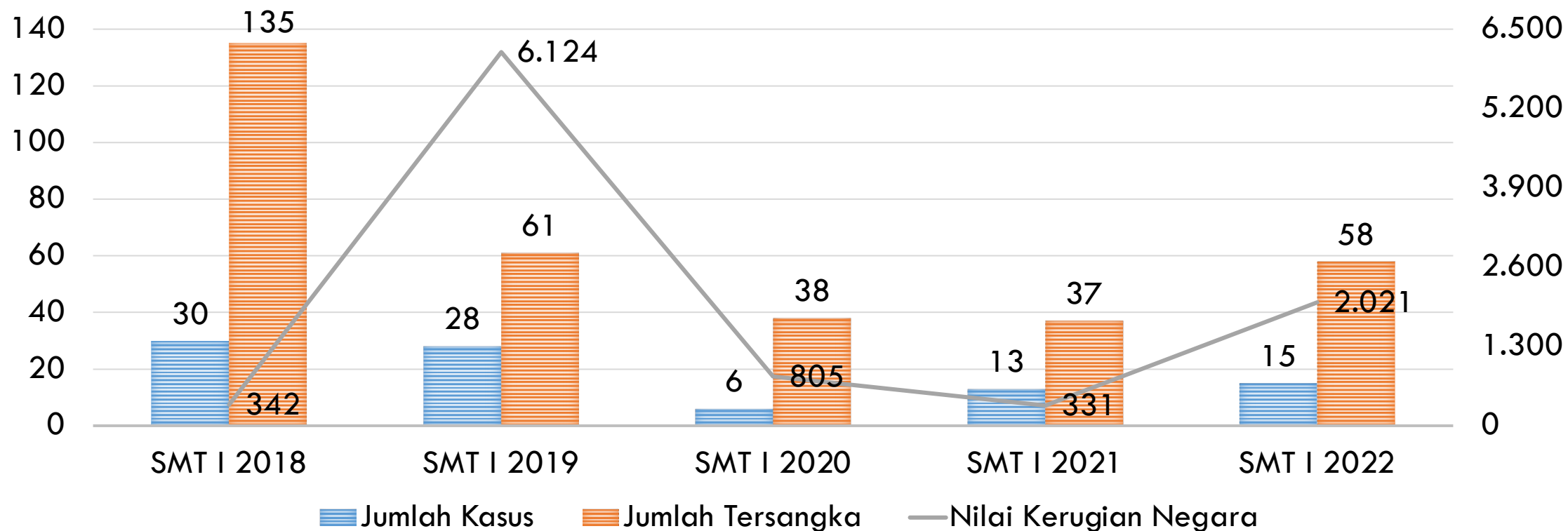
- Pasal yang banyak digunakan Kepolisian dalam menjerat pelaku adalah pasal Kerugian Negara yakni sebanyak 50 kasus,
- Janji Kapolri Listyo Sigit yang pada saat *fit and proper test* menegaskan akan memaksimalkan pemulihan aset dalam kasus korupsi.
- Selain itu, pada bulan Februari 2021 lalu, Kapolri meningkatkan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya agar lembaganya mampu mengoptimalkan *asset recovery* dalam kasus tindak pidana ekonomi
- Namun kenyataannya kepolisian hanya sebanyak 2 kali menerapkan instrument pasal pencucian yang yakni kasus pendudukan lahan perkebunan di Sumatera Selatan dan Pengadaan Lahan di Cengkareng

Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi

- Dengan sumber daya yang melimpah dari segi anggaran ketimbang Kejaksaan dan KPK, kinerja Kepolisian justru lebih buruk;
- Tidak ada upaya dari Kepolisian untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis.



Komisi Pemberantasan Korupsi





Kuantitas Penanganan Kasus

- Kerja KPK selama semester I tahun 2022 mengalami stagnans baik dari segi jumlah, tersangka, maupun nilai kerugian negara, di mana tercatat KPK hanya menangani 15 kasus korupsi.
- Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 25 persen dari target selama semester I 2022 sebanyak 60 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja KPK masuk dalam kategori **D atau Buruk**.

Kualitas Penanganan Kasus

- Lima aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yaitu Kepala Daerah (10 orang), Pegawai Pemerintah Daerah (17 orang), Swasta (13 orang), pejabat BUMN (3 orang), dan pegawai BUMN (3 orang)
- Tidak ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
- Berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian, KPK paling dominan menggunakan pasal suap dalam menangani perkara selama semester I tahun 2022, yakni 12 dari 15 kasus

Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi

- Fungsi supervisi penindakan KPK tidak berjalan maksimal, KPK terlihat hanya fokus pada pencegahan
- Pasifnya kerja supervisi KPK ini bertolak belakang dengan semangat KPK ketika meminta pengesahan PerPres 102/2020 tentang supervisi pemberantasan korupsi
- Selain itu, kerja pencegahan KPK hanya sebatas jargon tanpa ada dampak yang signifikan
- Revisi UU KPK dan pimpinan kontroversial menjadi faktor buruknya tren penindakan kasus korupsi KPK



Permasalahan SDM KPK

Tercatat dalam laporan akhir tahun 2021, KPK memiliki 1.551 personil, 272 diantaranya di direktorat Penindakan dan Eksekusi

KPK Pecat 57 Pegawai per 30 September, Ini Daftar Lengkapnya

Reporter Editor
M Rosseno Aji Aditya Budiman

Kamis, 16 September 2021 06:32 WIB



BERITA > NASIONAL

Ketua KPK Curhat ke Jokowi: Kurang Personel dan Markas di Daerah

Kamis, 9 Desember 2021 - 13:35 WIB

Oleh : Bayu Nugraha, Edwin Firdaus



Kesimpulan



Temuan Umum

- Sepanjang semester I tahun 2022, ICW mencatat terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai terangka oleh penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK;
- Pada enam bulan pertama di tahun 2022, tercatat potensi nilai kerugian negara mencapai Rp33.665.722.615.031 (33 Triliun), potensi nilai suap dan gratifikasi Rp 149.954.412.284 (149 miliar), potensi nilai pungutan liar Rp 8.836.600.000 (8,8 miliar), dan potensi nilai uang yang disamarkan dalam praktik pencucian uang sebesar Rp 931.700.000.000 (931 miliar);
- Sumber primer perolehan informasi penanganan perkara terutama yang diusut oleh Kejaksaan dan Kepolisian cenderung sulit ditemukan, sedangkan KPK sangat informatif;
- Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh APH secara keseluruhan sepanjang semester I tahun 2022 hanya mencapai 18 persen dari target sebanyak 1.387 kasus, sehingga memperoleh nilai E atau SANGAT BURUK;

Kesimpulan



Analisis Temuan

- Secara kuantitas, baik dari jumlah kasus, tersangka, maupun potensi nilai kerugian negara mengalami peningkatan meski tidak signifikan;
- Peningkatan potensi nilai kerugian negara menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara baik oleh pemerintah, kementerian, maupun lembaga negara masih sangat buruk;
- Tiga modus yang paling dominan muncul sepanjang semester I tahun 2022 ialah penyalahgunaan anggaran, penggelembungan harga atau mark up, dan kegiatan atau proyek fiktif;
- Dominasi tiga modus operandi ini banyak ditemukan dalam kasus korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- Tiga sektor yang banyak diungkap oleh APH sepanjang semester I tahun 2022 ialah, sektor desa, utilitas, dan pemerintahan;
- Korupsi di sektor desa secara konsisten secara tahun 2015 terus mengalami peningkatan, padahal di saat yang sama alokasi atau pagu anggaran desa semakin besar;
- Dalam sektor utilitas, kebersihan dan tata kota serta infrastruktur jalan menjadi penyumbang terbanyak kasus korupsi pada semester I tahun 2022;
- Dari 25 kasus yang diungkap di sektor pemerintahan, 92 persen diantaranya merupakan korupsi anggaran belanja pemerintahan;

Kesimpulan



Analisis Temuan

- Sepanjang semester I tahun 2022, provinsi Jawa Timur menjadi kontributor terbanyak sebagai daerah dengan korupsi paling banyak yakni 35 kasus korupsi;
- Tim pemantau tidak menemukan adanya informasi penanganan perkara yang dilakukan oleh APH di provinsi Kalimantan Utara;
- Aktor yang paling banyak diusut oleh APH sepanjang semester I tahun 2022 adalah pegawai pemerintahan daerah, swasta, dan kepala desa;
- Dari 612 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 38 persen diantaranya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan pada semester I tahun 2022 memperoleh nilai C atau CUKUP, karena dari 514 target kasus yang harus disidik selama enam bulan, Kejaksaan telah merealisasikan sebanyak 183 kasus atau sekitar 36 persen;
- Tren buruk penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian masih terus berlanjut, pada semester I tahun 2022, Kepolisian hanya berhasil merealisasikan sekitar 7 persen dari target penanganan kasus korupsi sebanyak 813 kasus selama 6 bulan, sehingga korps bhayangkara ini harus memperoleh nilai E atau SANGAT BURUK;
- KPK mengalami stagnansi penindakan kasus korupsi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester I tahun 2022, data penindakan korupsi yang terkumpul adalah 15 kasus, sehingga KPK hanya mendapat nilai D atau BURUK.
- Buruknya kinerja APH lain secara langsung dikontribusikan oleh lemahnya fungsi koordinasi dan supervisi KPK sebagai lembaga yang memiliki peran sebagai trigger mechanism.



Rekomendasi

Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK)

- Kerja-kerja yang berkaitan dengan penindakan kasus korupsi oleh setiap APH harus dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel dengan cara menyampaikan informasi terkait penanganan perkara secara berkala dalam sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- Setiap APH harus lebih aktif untuk memaksimaliskan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dengan cara mengenakan instrument pasal pencucian uang;
- Setiap APH harus lebih aktif dalam mengusut perkara yang menyangkut keterlibatan korporasi sebagai terduga pelaku korupsi dengan memaksimalkan instrumen PERMA No. 13 Tahun 2016;
- Setiap APH perlu melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas secara berkala bagi para penyidiknya agar penindakan kasus korupsi dapat berjalan lebih efektif;



Rekomendasi

Pemerintah dan DPR

- Berkaitan dengan korupsi di sektor pemerintahan dan birokrasi, Pemerintah harus segera melakukan penguatan kelembagaan Inspektorat di masing-masing instansi Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah guna meminimalisir terjadinya korupsi di sektor ini
- Pemerintah dan DPR harus memprioritaskan proses legislasi dengan segera mengesahkan sejumlah regulasi antikorupsi seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai dan Revisi UU Tindak Pidana Korupsi, untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum kasus korupsi;
- Pemerintah dan DPR harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja setiap institusi penegak hukum dan menjadikan kinerja serta capaian dalam menindak kasus korupsi sebagai dasar menentukan besaran pagu anggaran tiap institusi.
- DPR yang memiliki fungsi anggaran harus memangkas pagu anggaran APH yang terbukti kinerjanya buruk dalam kasus korupsi.

TERIMA KASIH

